## DPR Dorong Pemerintah Aktif Lobi Saudi soal Syarat Vaksin Jamaah Haji

**JAKARTA (IM)** - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak mendorong pemerintah agar lebih aktif melobi pemerintah Arab Saudi agar vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia diakui sebagai persyaratan haji tahun ini.

Indonesia membutuhkan diplomasi yang sangat intens agar pemerintah Arab Saudi mau mengakui jenis vaksin yang dipakai di Indonesia yakni Sinovac sehingga mendapatkan izin berhaji.

Amin berharap tim diplomasi gabungan yang terdiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Agama (Kemenag), lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi.

"Bagaimanapun jamaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan negara-negara lainnya. Jika tahun ini belum juga diperbolehkan, antreannya akan makin panjang. Kasihan jamaah kita," kata Amin kepada wartawan, Kamis (27/5).

Sebagai informasi, berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma dan Distributor Vaksin, pemerintah Saudi menetapkan vaksin yang disetujui adalah vaksin-vaksin yang berasal dari Amerika dan Eropa yaitu, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca.

Dari ketiga vaksin tersebut, Indonesia baru punya vaksin AstraZeneca yang sesuai kriteria.

Merujuk penjelasan Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, Anggota Komisi VI DPR melanjutkan, vaksin Sinovac yang merupakan vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia dan saat ini masih dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO.

Sesuai janji WHO, kata dia, izin penggunaan darurat paling lambat akan didapatkan pada pekan kedua Juni 2021, sehingga masih cukup waktu agar jamaah haji Indonesia diperbolehkan berangkat ke tanah suci tahun ini.

Kerajaan Arab Saudi sebelumnya mengumumkan musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas.

Persoalannya, Indonesia belum memiliki kepastian berapa alokasi kuota yang didapat tahun ini.

Padahal sejumlah negara sudah diumumkan alokasi kuotanya oleh pemerintah Arab Saudi.

Oleh karena itu, Amin berharap, vaksin yang sudah diberikan bisa memberikan manfaat bagi kemudahan jamaah haji Indonesia. ● **mei**

## Jaksa Ajukan Banding Atas Vonis 15 Tahun Penjara John Kei

**JAKARTA (IM)** - Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas vonis 15 tahun yang dijatuhkan pada terdakwa pembunuhan berencana John Refra alias John Kei. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kasie Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Edwin Beslar.

Menurut Edwin, jaksa telah mengajukan banding pada Selasa (25/5) kemarin.

"JPU sudah nyatakan banding pada Selasa kemarin," kata Edwin saat dikonfirmasi Kamis (27/5).

Dengan diajukannya banding, kewenangan pemeriksaan kini jatuh pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya, John dijatuhkan vonis hukuman penkara selama 15 tahun oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis (20/5) lalu.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun," kata Yulisar, Hakim Ketua, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (20/5) lalu.

John, dinyatakan terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 170 tentang pengeroyokkan.

Untuk diketahui, jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya menuntut 18 tahun hukuman penjara kepada John.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa John Refra alias John Kei dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan permintaan tetap ditahan," kata Jaksa di persidangan Selasa (11/5).

John dianggap sebagai penganjur atas terbunuhnya seorang anak buah Nus Kei, yakni Yustus Corwing alias Erwin di Duri Kosambi pada 21 Juni 2020.

Pada Selasa (18/5) John mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Ia mengaku tak bersalah dan berharap dibebaskan dari seluruh tuntutan yang dijatuhkan padanya.

"Saya masih berhak mendapat kebenaran dan keadilan. Saya tidak bersalah akan tuduhan pidana yang diberikan kepada saya. Saya masih ada harapan pada keadilan, saya masih ada harapan bagi Majelis Hakim, wakil Tuhan penjunjung tinggi keadilan," kata John di pengadilan

"Keadilan dari majelis agar dapat memberi putusan yang sesuai kebenaran dan bebaskan saya dari semua tuntutan ini," tambahnya. Namun, pledoi ini ditolak oleh hakim. ● **han**

IDN/ANTARA

**RAKER ANTISIPASI LONJAKAN KASUS COVID-19**

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito (kiri) bersama Wamenkes Dante Saksono Harbuwono (kedua kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5). Raker tersebut membahas persiapan sistem kesehatan nasional sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19 pascalibur Idul Fitri 1442 H/2021 M.

# 51 Pegawai KPK Diberhentikan, Moeldoko: Arahan Presiden tak Diabaikan

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, mengaku sangat siap jika keputusan memberhentikan 51 pegawai KPK digugat.

**JAKARTA (IM)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memberhentikan 51 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sementara sebelumnya Presiden Jokowi meminta agar TWK tidak dijadikan dasar untuk memecat pegawai KPK terkait proses peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Apakah arahan Kepala Negara diabaikan?

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah adanya pengabaian terhadap arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, Kantor Staf Presiden, Kementerian dan Lembaga terkait secara solid mendukung dan melaksanakan arahan Presiden Jokowi.

"Terhadap arahan Presiden Jokowi tersebut, Kantor Staf Presiden, Kementerian dan Lembaga terkait secara solid mendukung dan melaksanakannya," kata Moeldoko dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (27/5).

Ia menegaskan bahwa kementerian/lembaga telah menjalankan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

"Tidak benar terjadi pengabaian arahan Presiden. Untuk menjalankan arahan Presiden, di antaranya Menteri PANRB, Menteri Hukum dan HAM, BKN, dan LAN telah melakukan koordinasi dengan Pimpinan KPK dan menyampaikan arahan Presiden tersebut dengan memberikan opsi pembinaan sebagai solusinya. Kemenpan-RB mengusulkan dilakukan individual development plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK," ujarnya.

Dari 75 nama pegawai yang tidak lolos TWK, hanya 24 peserta yang akan diberikan diklat wawasan kebangsaan untuk nantinya beralih status menjadi ASN.

"Dengan kata lain, pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan untuk memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus TWK. Bahwa Pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri. Hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK," tuturnya.

Dia menilai, bahwa pemerintah memang memiliki kewenangan tertentu tapi tidak bisa mencampuri proses pembinaan di internal KPK. Terkait keputusan tersebut maka KPK bertanggungjawab penuh atas implikasinya.

Dalam hal ini, bahwa tes wawasan kebangsaan tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian dan terdapat peluang untuk perbaikan melalui pendidikan kedinasan, level individual maupun organisasi."Posisi KSP, Kementerian dan lembaga yang berada dalam kewenangan langsung Presiden tetap dalam posisi mendukung pelaksanaan arahan Presiden sebagaimana tersebut di atas," tuturnya.

Dia juga menegaskan, bahwa tidak ada pengabaian terhadap arahan Presiden Jokowi tersebut.

**Kepala BKN Siap Digugat**

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengaku sangat siap jika keputusan memberhentikan 51 pegawai KPK digugat. "Sangat siap," katanya, Kamis (27/5).

Dia mengatakan, jika ada yang menggugat malah menjadi momentum untuk menunjukkan berbagai bukti atas keputusan tersebut."Malah jadi bisa membuka evident di pengadilan," tuturnya.

Lebih lanjut Bima kembali menegaskan, apa yang diputuskan sudah mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu termasuk juga mengikuti berbagai aturan yang berlaku. ● **han**

## 1.500 WNI Menjadi Teroris Lintas Batas

**JAKARTA (IM)** – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar ungkap ada sekitar 1.500 warga negara Indonesia (WNI) menjadi teroris lintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF).

Boy memaparkan laporan Sekjen PBB ke-9 tahun 2019 terkait terorisme internasional, yang dikutip dari Sofwan Centre. Laporan itu menyebut 30.000 hingga 42.000 warga dari 100 negara menjadi FTF, termasuk Indonesia.

"Di Indonesia sendiri, gambaran FTF asal Indonesia sebagaimana perkiraan Satgas FTF BNPT, total FTF asal Indonesia adalah sekitar 1.500," kata Boy, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/5).

Menurut Boy, dari 800 WNI yang terlibat terorisme di luar negeri, sekitar 100 orang telah meninggal dunia. Kemudian 550 orang sudah dideportasi dan 50 orang sudah kembali ke Tanah Air atau returnees. Boy mengatakan, sebanyak 120 orang telah diproses sesuai hukum ketika tiba di Indonesia sejak 2015. Sementara itu, bagi returnees yang tidak diproses harus menjalani program deradikaliasi.

"Sehingga saat ini telah atau sedang menjalani proses hukum dalam melakukan tindak pidana terorisme atau pendanaan terorisme," ujar Boy.

Menurut Boy, seharusnya saat ini BNPT sudah berangkat ke Suriah dan Irak untuk melakukan asesmen terhadap WNI yang terlibat terorisme. Namun, agenda tersebut terkendala pandemi Covid-19 yang masih mewabah di berbagai negara.

"Kami dengan tim satgas akan melakukan asesmen kepada mereka untuk kemudian dilaporkan kepada bapak presiden bagaimana kondisi mereka apakah layak untuk dilakukan repatriasi dikembalikan ke negara kita. Proses ini masih terkendala dengan kondisi Covid yang terjadi," katanya. ● **han**

**PENGUMUMAN**

Dengan ini diumumkan kepada para Kreditur dan para Debitur perseroan bahwa "PT. TEMPINDO BINAJASA", berkedudukan di Jakarta Pusat, telah dibubarkan terhitung mulai tanggal 05 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pembubaran "PT. TEMPINDO BINAJASA" tanggal 06 Mei 2021 nomor 01 yang dibuat oleh BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan kepada para Kreditur dan Para Debitur perseroan dipersilakan untuk menghubungi:

Team Likuidatur:
Tn. STEFAN LOOHO
Alamat: Komp. Majapahit Permai
Blok B 125-126
Jl. Majapahit No. 18-22

Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini. Demikian disampaikan.

Team Likuidatur

**PENGUMUMAN**
**HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**
**PT INTI ANUGRAH ESTETIKA (DALAM LIKUIDASI)**

Sehubungan dengan pelunasan, pembebasan kepada Likuidator, dan penerimaan pertanggungjawaban Likuidator PT Inti Anugrah Estetika (Dalam Likuidasi) sebagaimana ketentuan Pasal 152 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan ini diumumkan bahwa proses Likuidasi PT Inti Anugrah Estetika (Dalam Likuidasi) telah selesai berdasarkan keputusan RUPS.

RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban Likuidator dan membebaskan Likuidator terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam proses Likuidasi. Terhadap kekayaan hasil Likuidasi telah habis dan/atau tidak tersisa.

Jakarta, 28 Mei 2021.

**Tim Likudator PT Inti Anugrah Estetika (Dalam Likuidasi)**

**PENGUMUMAN**

**RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**
**PT MARGA NURINDO BHAKTI**

Dengan ini kami mengundang Para Pemegang Saham **PT MARGA NURINDO BHAKTI**, berkedudukan di Jakarta Selatan (**"Perseroan"**), untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 11 Juni 2021
Pukul : 09.30 WIB – selesai.
Tempat : Menara Anugrah Lantai 10
Jalan Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.6-8.7
Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950
Acara Rapat : Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Kami harapkan kehadiran Para Pemegang Saham tepat pada waktunya karena mengingat pentingnya acara tersebut.

Jakarta, 28 Mei 2021
ttd
**Berto Lomios**
**Direktur Utama**

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Jo. Pasal 152 ayat (1) Jis Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Likuidator dengan ini bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") **PT TRIJAYA ANUGRAH ESTETIKA** (Dalam Likuidasi) ("Perseroan") dan Kami mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir pada RUPS LB Perseroan, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Juni 2021
Waktu : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Resha Agriansyah Partnership
The H Tower, 12nd Floor, Unit 12-D, Jl. HR. Rasuna Said Kav.20, Karet Kuningan, Jakarta Selatan.

RUPS LB ini diselenggarakan dengan agenda rapat sebagai berikut:
1. Rencana penjualan aset Perseroan berupa Rumah beralamat di Jl. Gading Indah Utara III Blok NH-5 No. 5A (d/h No. 4), Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
2. Rencana penjualan aset Perseroan berupa kendaraan roda empat bernomor polisi B 2098 UFD atas nama PT Trijaya Anugrah E;
3. Rencana penjualan aset Perseroan berupa kendaraan roda dua bernomor polisi B 3718 URF atas nama PT Trijaya A Estetika;
4. Penjualan aset PT Trijaya Anugrah Estetika (Dalam Likuidasi);
5. Lain-lain.

Mempertimbangkan agenda Rapat tersebut sangat penting, maka sekiranya Para Pemegang Saham Perseroan dapat hadir tepat waktu.

Demikian undangan RUPS LB ini Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Mei 2021
**Likuidator Perseroan**
**Resha Agriansyah, S.H., M.H., CPCLE., CCCLE.**
**Muhammad Arfah, S.H.**

**PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk**

**Kantor Pusat :**
Jln. Pelabuhan Ferry RT/RW 005/001
Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp.: (0518) 71869
Email : corsec@batulicinnusantaramaritim.com
Website : www.batulicinnusantaramaritim.com

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**Tanggal 31 Desember 2020**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **ASET** | | |
| **ASET LANCAR** | | |
| Kas dan bank | 44.586.893.073 | 8.689.495.998 |
| Piutang usaha - neto | | |
| Pihak ketiga | 47.559.244.445 | 544.897.944 |
| Pihak berelasi | 6.003.571.122 | 10.260.571.122 |
| Piutang lain-lain - pihak ketiga | 65.068.000 | 71.998.250 |
| Beban dibayar di muka | 1.719.910.458 | 1.375.871.753 |
| Pajak dibayar di muka | - | 144.407.633 |
| Beban ditangguhkan | - | 240.218.887 |
| **Total Aset Lancar** | **99.934.687.098** | **21.327.461.587** |
| **ASET TIDAK LANCAR** | | |
| Uang muka pembelian aset tetap | 40.118.400.000 | 39.093.100.000 |
| Aset tetap - neto | 480.354.446.236 | 508.558.677.526 |
| **Total Aset Tidak Lancar** | **520.472.846.236** | **547.651.777.526** |
| **TOTAL ASET** | **620.407.533.334** | **568.979.239.113** |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | |
| **LIABILITAS** | | |
| **LIABILITAS JANGKA PENDEK** | | |
| Utang usaha | | |
| Pihak ketiga | 17.660.138.731 | 7.467.517.433 |
| Pihak berelasi | 2.397.973.404 | 3.197.286.485 |
| Utang lain-lain - pihak berelasi | 2.360.905.316 | 1.366.626.156 |
| Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 1.524.050.541 | 1.515.238.580 |
| Utang pajak | 2.689.117.779 | 135.066.609 |
| Beban akrual | 227.795.835 | 104.120.000 |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | |
| Pinjaman bank | 78.343.872.792 | 78.343.872.792 |
| Liabilitas sewa | 386.916.617 | - |
| **Total Liabilitas Jangka Pendek** | **105.590.771.015** | **92.129.728.055** |
| **LIABILITAS JANGKA PANJANG** | | |
| Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: | | |
| Pinjaman bank | 187.819.861.945 | 215.766.830.143 |
| Liabilitas sewa | 3.122.618.862 | - |
| Pendapatan diterima di muka | - | 15.372.252.807 |
| Utang pihak berelasi | - | 42.628.660.067 |
| Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 6.978.283.051 | 3.723.457.660 |
| **Total Liabilitas Jangka Panjang** | **197.920.763.858** | **277.491.200.677** |
| **TOTAL LIABILITAS** | **303.511.534.873** | **369.620.928.732** |
| **EKUITAS** | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp 50 per saham | | |
| Modal dasar - 10.800.000.000 saham | | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.402.436.702 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2.700.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019 | 170.121.835.100 | 135.000.000.000 |
| Tambahan modal disetor | 35.703.689.352 | 27.500.000 |
| Saldo laba | | |
| Dicadangkan | 22.306.937.716 | 22.306.937.716 |
| Belum dicadangkan | 88.763.536.293 | 42.023.872.665 |
| **TOTAL EKUITAS** | **316.895.998.461** | **199.358.310.381** |
| **TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS** | **620.407.533.334** | **568.979.239.113** |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **PENDAPATAN - NETO** | 295.532.059.811 | 240.357.716.470 |
| **BEBAN POKOK PENJUALAN** | 195.281.541.071 | 167.077.021.714 |
| **LABA BRUTO** | **100.250.518.740** | **73.280.694.756** |
| **BEBAN USAHA** | 30.008.077.465 | 26.019.699.843 |
| **LABA USAHA** | **70.242.441.275** | **47.260.994.913** |
| **PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN** | | |
| Pendapatan jasa manajemen | 13.830.391.569 | - |
| Pendapatan klaim asuransi | 2.100.472.800 | - |
| Penghasilan keuangan | 563.702.664 | 231.803.110 |
| Beban keuangan | (33.308.084.524) | (34.454.616.129) |
| Lain-lain - neto | 1.312.305.008 | - |
| **Beban Lain-lain - Neto** | **(15.501.212.483)** | **(34.222.813.019)** |
| **LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN** | **54.741.228.792** | **13.038.181.894** |
| **BEBAN PAJAK PENGHASILAN** | (3.546.384.718) | (3.091.337.317) |
| **LABA TAHUN BERJALAN** | **51.194.844.074** | **9.946.844.577** |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: | | |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | (794.180.446) | 602.783.308 |
| **TOTAL LABA KOMPREHENSIF** | **50.400.663.628** | **10.549.627.885** |
| **LABA PER SAHAM DASAR** | **22,93** | **7,61** |

**LAPORAN ARUS KAS**
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | |
| Penerimaan dari pelanggan | 237.402.460.503 | 293.749.861.749 |
| Penerimaan dari klaim asuransi | 2.100.472.800 | - |
| Pendapatan keuangan | 563.702.664 | 231.803.110 |
| Pembayaran kepada pemasok | (137.918.264.447) | (141.805.727.576) |
| Pembayaran beban keuangan | (33.308.084.524) | (34.454.516.129) |
| Pembayaran kepada karyawan | (25.281.085.240) | (20.183.720.871) |
| Pembayaran beban usaha | (18.182.150.740) | (16.178.327.409) |
| Pembayaran pajak penghasilan | (3.537.043.694) | (4.851.604.185) |
| Pelunasan (pemberian) piutang lain-lain | - | 21.061.740.568 |
| Penerimaan dari (pembayaran untuk) kegiatan operasional lainnya | 15.724.736.462 | (589.990.450) |
| **Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi** | **37.564.743.784** | **96.979.518.807** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | |
| Penambahan uang muka pembelian aset tetap | (1.025.300.000) | (77.658.100.000) |
| Perolehan aset tetap | (684.253.000) | (476.662.100) |
| **Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi** | **(1.709.553.000)** | **(78.134.762.100)** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | |
| Penerbitan saham melalui penawaran umum perdana | 73.500.000.000 | 750.000 |
| Penerbitan saham melalui pelaksanaan waran | 307.024.452 | - |
| Penerimaan (pembayaran) utang pihak berelasi | (42.628.660.067) | 28.126.245.067 |
| Pembayaran utang bank | (27.946.968.198) | (65.160.539.450) |
| Pembayaran biaya emisi saham perdana | (2.768.781.113) | (240.218.887) |
| Pembayaran porsi pokok liabilitas sewa | (420.408.783) | - |
| **Arus Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan** | **42.206.291** | **(37.273.763.270)** |
| **KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK** | **35.897.397.075** | **(18.429.006.563)** |
| **KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN** | **8.689.495.998** | **27.118.502.561** |
| **KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN** | **44.586.893.073** | **8.689.495.998** |

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | Modal Saham | Tambahan Modal Disetor | Saldo Laba: Dicadangkan | Saldo Laba: Belum Dicadangkan | Total Ekuitas |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo 1 Januari 2020** | **135.000.000.000** | **27.500.000** | **22.306.937.716** | **42.023.872.665** | **199.358.310.381** |
| Dampak penerapan PSAK 71 | - | - | - | (3.661.000.000) | (3.661.000.000) |
| **Saldo 1 Januari 2020 (setelah penyesuaian)** | **135.000.000.000** | **27.500.000** | **22.306.937.716** | **38.362.872.665** | **195.697.310.381** |
| Laba tahun berjalan | - | - | - | 51.194.844.074 | 51.194.844.074 |
| Penerbitan saham melalui penawaran umum perdana | 35.000.000.000 | 38.500.000.000 | - | - | 73.500.000.000 |
| Penerbitan saham melalui pelaksanaan waran | 121.835.100 | 185.189.352 | - | - | 307.024.452 |
| Biaya penerbitan saham | - | (3.009.000.000) | - | - | (3.009.000.000) |
| Rugi komprehensif lain: | | | | | |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang | - | - | - | (794.180.446) | (794.180.446) |
| **Saldo 31 Desember 2020** | **170.121.835.100** | **35.703.689.352** | **22.306.937.716** | **88.763.536.293** | **316.895.998.461** |

**Catatan :**
Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota jaringan Crowe Global), auditor independen, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit No. 00650/2.1051/AU.1/06/0929-2/1/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup catatan atas laporan keuangan.

Jakarta, 28 Mei 2021
**S.E & O**

**Direksi**
**PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk**

**POWER AUCTION — LELANG OTOMOTIF**

**TERBUKA UNTUK UMUM**

PT. POWER ASETINDO SELARAS melalui Pejabat Lelang Kelas II wilayah DKI Jakarta akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sukarela atas barang bergerak berupa **RATUSAN UNIT MOBIL & RATUSAN UNIT MOTOR** yang terdiri dari berbagai merk dan type, pada :

| OPEN HOUSE | WAKTU OPEN HOUSE | LELANG | WAKTU LELANG | LOKASI OPEN HOUSE & LELANG |
|---|---|---|---|---|
| Sabtu - Minggu, 05 - 06 Juni 2021 | 09.00 WIB s/d 17.00 WIB | Senin, 07 Juni 2021 | 11.00 s/d Selesai | Jl. Palem Raya No.39 Rt. 07 Rw.08, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan |
| Sabtu - Minggu, 12 - 13 Juni 2021 | 09.00 WIB s/d 17.00 WIB | Senin, 14 Juni 2021 | 11.00 s/d Selesai | |
| Sabtu - Minggu, 19 - 20 Juni 2021 | 09.00 WIB s/d 17.00 WIB | Senin, 21 Juni 2021 | 11.00 s/d Selesai | |
| Sabtu - Minggu, 26 - 27 Juni 2021 | 09.00 WIB s/d 17.00 WIB | Senin, 28 Juni 2021 | 11.00 s/d Selesai | Kami hadir di POOL baru |

**SYARAT & KETENTUAN LELANG :**
1. Peminat **LELANG MOBIL & MOTOR** diwajibkan menyetorkan uang jaminan sebesar :
   - **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NIPL MOBIL**
   - **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NIPL MOTOR**
2. Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya (*"as is"*)
3. Uang Jaminan dan pelunasan disetorkan ke **rekening a/n PT. Power Asetindo Selaras A/C no. 5710999971** di BCA cab. Kyai Caringin, Jakarta Pusat
4. Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu **5 (LIMA) hari setelah lelang** maka pemenang lelang dinyataan **wanprestasi** dan **uang jaminan akan hangus**
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Asetindo Selaras, telp : 0812-1953-2073 (Putra) atau melalui email : **putra@power-auction.id**

Jakarta, 28 Mei 2021
**PANITIA LELANG**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110

No. Telp. Sentral :
(021) 360650 - (021) 3606006
No. Telp. DKPPU : (021) 22566288 - (021) 25608887

No. Fax. Sentral :
(021) 3505136 - (021) 3509139
No. Fax DKPPU : (021) 2255 6399

**PENGUMUMAN LELANG**

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I akan melaksanakan pelelangan umum Barang Milik Negara berupa:

| No | Jenis Barang | No. Polisi | Merk/ Tipe | Tahun Pembuatan | Nilai Limit (Rp) | Uang Jaminan (Rp) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minibus | B 1348 PQ | Kijang Innova | 2006 | 70.170.000,00 | 14.170.000,00 | Rusak Berat |
| 2 | Minibus | B 1020 PQO | Isuzu Panther | 2010 | 89.639.000,00 | 18.000.000,00 | Rusak Berat |
| 3 | Minibus | B 1021 PQO | Isuzu Panther | 2010 | 90.717.000,00 | 18.000.000,00 | Rusak Berat |

- Cara penawaran dilaksanakan dengan metode internet **open bidding** dengan mengakses laman **https://www.lelang.go.id**
- Penawaran dapat diajukan sejak hari Kamis tanggal 03 Juni pukul 09.00 s.d. 11.00 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB.
- Penetapan pemenang: setelah batas akhir penawaran.
- Bea lelang 2% dari harga lelang.
- Tempat penetapan pemenang: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410.

**Keterangan :**
- Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (Virtual Account) PT BNI harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan;
- Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Jakarta I selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;
- Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

**Syarat-syarat lelang:**
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website **https://www.lelang.go.id** syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada website tersebut. Objek lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I dan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.
2. Pemenang Lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah bea lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila sampai dengan waktunya yang telah ditentukan, pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
3. Peserta lelang diharapkan melihat, mengetahui objek lelang dan dapat melihat barang yang akan dilelang pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 pukul 09.00 s.d 12.00 WIB di Kantor Kementerian Perhubungan Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110. Peserta lelang dianggap menyetujui aspek legal dari objek lelang dengan kondisi apa adanya, mengetahui ketentuan dan keadaan objek lelang.
4. Syarat-syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi M.Isnaeni (0812 8835 8711), Ruri (0813 1893 4020).

Jakarta, 28 Mei 2021
Panitia Lelang Barang Milik Negara
Direktorat Kelaikudaraan dan
Pengoperasian Pesawat Udara